

PEMIKIRAN PROF. DR. PHIL. ASTRID S. SUSANTO TENTANG KEBEBASAN PERS DAN PENDAPAT UMUM

A. Ratnawati*

ABSTRAK

Pemikiran Dr. Astrid Susanto yang menekankan pada penggunaan elit lokal dan memperhatikan lokal genius (cultural identity-kepribadian cultural), akan dapat diperoleh suatu pengawasan sosial yang relevan, berhasil guna maupun bermutu untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam proses pembangunan, sehingga peran pers dalam masyarakat akan lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi khalayak dan pengambil keputusan. Selanjutnya, dapat digarisbawahi bahwa kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru dipraktikkan dengan terbatas, mengingat system pers yang dikembangkan adalah otoriter dalam konsep pers pembangunan. Sedangkan pendapat umum sebagai produksi media mempunyai peranan penting untuk menyalurkan agenda media kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kebebasan pers, pendapat umum

I. PENDAHULUAN

Paradigma komunikasi pada masa Orde Baru terpolo secara linier. Artinya, bentuk komunikasi yang dirancang untuk melancarkan dan mendukung proses pembangunan nasional kala itu berlangsung dari komunikator kepada khalayak. Masyarakat sebagai khalayak atau obyek komunikasi dipandang secara statis. Tidak mempunyai aspirasi atau pendapat lain, selain dari pemerintah. Namun yang berkembang kemudian adalah model komunikasi propaganda untuk rezim yang berkuasa. Konsep komunikasi dalam pembangunan, yang dikenal sebagai komunikasi pembangunan pada awalnya untuk mensukseskan, terutama sektor kehidupan masyarakat luas seperti pertanian dan kependudukan, tidak lepas dari misi pemerintah (Rachmadi, 1999).

* Peneliti Muda pada Pusat Pengembangan Literasi, Badan Litbang SDM, Depkominfo.

Sebagai suatu konsep, komunikasi pembangunan itu baik. Namun dalam implementasinya banyak muatan yang harus masuk atau menyertainya, sehingga konsep komunikasi pembangunan tidak lagi murni bagi tujuan dan sasaran tertentu yang sudah terprogram. Bisa jadi melenceng atau tidak tepat lagi sampai kepada khalayak. Konsep komunikasi pembangunan banyak diadopsi dari East West Center, Hawaii.

Apakah dalam konsep komunikasi pembangunan itu juga diperlukan kebebasan pers atau pendapat umum, yang menjadi bagian penting dalam proses komunikasi massa sebagai efek pesan atau reaksi khalayak? Konsep kebebasan pers dalam teori komunikasi termasuk dalam kelompok teori normatif media, bagaimana seharusnya media berperan dalam melaksanakan kebebasan pers dalam masyarakat? Pada praktiknya hal itu banyak dijumpai penyimpangan atau reduksi dalam realitas sosialnya. Artikel ini akan menguraikan pendapat Prof. Dr. Astrid S. Susanto tentang kebebasan pers dan pendapat umum dikaitkan dalam konteks komunikasi pembangunan.

II. KEBEBASAN PERS DALAM KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Konsep komunikasi pembangunan, menurut William Hachten dari tipologi lima sistem pers merupakan variasi dari teori pers otoritarian, William menempatkan peran komunikasi massa dalam konteks pembangunan bangsa. Pendukung jurnalistik pembangunan percaya bahwa media massa harus dimobilisasi untuk membantu pembangunan ekonomi, memberantas buta huruf dan pendidikan politik. Tipologi lima sistem pers menurut William Hachten (dalam Dedi Djamaluddin Malik, 1993), yaitu:

Pertama, sistem pers otoritarian, di mana kontrol terhadap publik dan pribadi menjadi bagian dari dan untuk negara. Dasar kebijakannya, media dapat beroperasi jika tidak terdapat kritik atau penolakan dari rezim atau adanya sensor terselubung atau nyata. Masih dipraktekkan di perwakilan negara-negara Eropa, kediktatoran moderen di Afrika, Amerika Latin dan sebagainya.

Kedua, sistem pers barat (libertarian dan tanggungjawab sosial), dimana kontrol terhadap kepemilikan pers oleh pribadi, dan sistem penyiaran oleh publik dan pribadi. Sedangkan dalam kebijakannya menekankan pada kebebasan dari kendali pemerintah, tapi wajib membentuk tanggungjawab. Tipologi sistem pers barat ini dianut secara luas di Amerika Serikat, Eropa Barat, Inggris dan Jepang.

Ketiga, sistem pers komunis, dimana kontrol media merupakan bagian penting dari partai politik atau pemerintah. Tidak ada kepemilikan pribadi. Kebijakan medianya, menekankan pada penyebaran pandangan dan kebijakan pejabat dan memobilisasi dukungan untuk kemajuan nasional

(semacam komunikasi propaganda), masih dianut dulu di perwakilan Uni Soviet (sebelum bubar), dan negara-negara Komunis Eropa Timur, Kuba dan China.

Keempat, sistem pers revolusioner. Dalam tipologi sistem pers yang revolusioner, kontrol media ilegal atau subversif tidak dikontrol oleh pemerintah. Kebijakan medianya atau praktik media yang banyak terjadi dalam bentuk media bawah tanah dan kerap dari luar negeri mencoba untuk menjatuhkan pemerintahan. Dianut pada perwakilan media bawah tanah pada saat perang, pers kolonial di Afrika dan India. (5) **Developmental**. Dalam sistem pers ini, kontrol oleh pemerintah dan atau mengontrol serta mengarahkan seluruh media. Kebijakan terhadap medianya, memobilisasi media untuk melayani tujuan nasional, integritas politik, kampanye memberantas kemiskinan, penyakit dan buta huruf. Sistem pers ini banyak dianut pada negara-negara non-industrialis, negara-negara non-komunis di dunia ketiga, termasuk Indonesia.

Dalam pembagian tipologi sistem pers menurut Hachten, praktek kebebasan pers dinikmati pada sistem pers barat yang menggabungkan libertarian dan tanggungjawab sosial, sementara bila dikaji pada sistem pers developmental tidak kurang lebih mendekati otoriter dalam praktek kebebasan persnya. Contoh aktual, sistem pers Indonesia dengan istilah sistem pers Pancasila mempunyai label "pers bebas dan bertanggungjawab", pada hakikatnya lebih bertanggungjawab kepada penguasa dan kebebasan pers berorientasi pada pembangunan. Disini media berperan penting dan strategis untuk memobilisasi kekuatan rakyat untuk suksesnya pembangunan nasional.

Pers Pancasila dengan istilah lain pers pembangunan banyak mengadopsi konsep pers developmental, menurut William Hachten bersumber dari pers otoriter. Kepemilikan dan kontrol media lebih banyak dilakukan pemerintah, sedangkan khusus untuk isi media, dalam konsep ini dikembangkan jurnalistik pembangunan, seperti yang terjadi di Indonesia menganut jurnalistik jenis ini pada masa Orde Baru. Di sini kebebasan pers diarahkan untuk kepentingan dan tujuan-tujuan komunikasi dari pemerintah.

III. MEDIA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Pembangunan yang dijalankan Orde Baru memerlukan aspek komunikasi agar dapat sukses. Dr. Astrid S Susanto memperkenalkan konsep komunikasi pembangunan pada saat proses pembangunan di Tanah Air tengah giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah. Saat itu pemerintah sangat memerlukan konsep-konsep pembangunan nasional agar arah, penyusunan

program dan pelaksanaan pembangunan itu tidak meleset. Dalam berbagai konsep pembangunan dibutuhkan aneka pendekatan terhadap pembangunan, seperti administrasi pembangunan, ekonomi pembangunan, pembangunan sosial, bahkan dalam bidang komunikasi juga dibutuhkan konsep komunikasi pembangunan.

Untuk memenuhi konsep komunikasi pembangunan, Dr. Astrid Sunarti Susanto menawarkan pengertian bahwa komunikasi diartikan untuk mendukung pembangunan pada sektor lain untuk mencapai sasarannya (1982:58). Agar konsep komunikasi pembangunan dapat berhasil diimplementasikan di tanah air maka perlu disiapkan tenaga terdidik dalam bidang perencanaan komunikasi. Pemikiran Dr. Astrid S. Susanto ini diperkuat dengan analisis Schramm dan Lerner dalam buku *Communication and Change, The Last Ten Years and the Next* (1976), menyatakan bahwa pendidikan ilmu komunikasi telah gagal dalam :

- a. Menganalisis komunikasi sebagai suatu proses psikologi, social dan cultural;
- b. Proses pembangunan ,di mana komunikasi sebagai landasan penunjang pembangunan telah dianalisa seakan-akan hanya mengandung unsure positif;
- c. Setiap situasi psikologi dalam komunikasi yang akan menghasilkan suatu struktur tersendiri

Bila pendidikan komunikasi mengambil pendekatan ini, maka fungsinya menjadi:

- a. Memberi/mempersiapkan agar mampu memberi pelayanan komunikasi;
- b. Meningkatkan kemampuan menganalisa proses komunikasi ,khususnya dalam mengumpulkan data serta menganalisa dan mengolahnya;
- c. Mendidik kader agar mampu ,selain menganalisa proses komunikasi juga meningkatkan kemampuannya menjadi; perencana komunikasi dan perumus kebijaksanaan.(dalam Astrid S. Susanto, 1982:28).

Dari hasil analisis tersebut, maka di tanah air banyak digiatkan kampanye komunikasi pembangunan. Artinya, disatu sisi untuk mengembangkan ilmu komunikasi dari segi teori dan praktik, dan disisi lain komunikasi dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan (nasional). Diantara pemikir dan pelaksana bidang komunikasi adalah Dr. Haryono Suyono dengan kampanye Keluarga Berencananya yang terakhir dengan semboyan "Dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja."

Schramm (1991) menyoroti media dalam pembangunan, yang menyebutkan ada 3 fungsi yaitu untuk : (1) memberitahu rakyat tentang pembangunan nasional, memusatkan perhatian mereka pada kebutuhan untuk berubah, kesempatan untuk menimbulkan perubahan, metoda dan cara menimbulkan perubahan dan jika mungkin meningkatkan aspirasi. (2) membantu rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan,

memperluas dialog dan menjaga agar informasi mengalir baik ke atas maupun ke bawah. (3) mendidik rakyat agar memiliki keterampilan.

Dengan demikian menurut Schramm, media massa dalam pembangunan mempunyai peranan yang khas. Media massa dapat menjadi pembimbing dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Lebih lanjut diartikan bahwa surat kabar sebagai bagian dari media massa merupakan buku tercetak bagi manusia (Rachmadi, 1990).

Proses pembangunan yang dijalankan di tanah air lebih banyak menjangkau daerah-daerah pedesaan, hal ini disebabkan hampir 60 persen penduduk tinggal di desa-desa. Adalah hal yang wajar bila pembangunan daerah pedesaan juga digiatkan dengan terarah dan sungguh-sungguh. Bagi masyarakat pedesaan, salah satu saluran komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi pembangunan adalah saluran komunikasi tradisional. Menurut Rogers (1976), media tradisional mempunyai potensi besar untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan karena mempunyai khalayak yang luas dan kredibilitas yang tinggi di mata penduduk desa.

Rogers mengemukakan ada dua jalan mencapai potensi komunikasi yang lebih besar dalam pembangunan, yaitu: (1) menggabungkan media massa dengan saluran-saluran antar perorangan, seperti diskusi kelompok dan forum media; (2) mempergunakan media komunikasi tradisional untuk menyiarkan pesan-pesan modernisasi atau pesan-pesan pembangunan. Dengan cara demikian, upaya pembangunan daerah pedesaan dapat dilakukan melalui komunikasi massa. Komunikasi massa dapat menunjang pembangunan daerah pedesaan untuk mencapai kesejahteraan.

Modernisasi mempunyai banyak kerumitan. Di negara berkembang, masyarakat yang sedang dalam proses modernisasi mengalami berbagai perubahan, antara lain di bidang sosial, ekonomi, politik dan komunikasi. Daniel Lerner (1978) dalam bukunya *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, mengemukakan teori bahwa pers dan media massa lainnya berperan dalam proses perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Menurut Lerner, suatu system komunikasi merupakan petunjuk sekaligus perantara atau penyebab terjadinya perubahan, dalam hal ini ialah perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern.

Dalam proses modernisasi terdapat empat factor utama yang mempengaruhi terjadinya perubahan, yaitu: (1) tingkat urbanisasi, (2) melek huruf, (3) partisipasi media dan (4) partisipasi politik. Di samping factor-factor tersebut terdapat satu faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan yaitu empati yang diartikan sebagai kemampuan untuk melihat diri sendiri dengan memakai kaca mata orang lain. Dengan empati masyarakat dirangsang untuk mengemukakan tanggapannya terhadap berbagai masalah. Dengan mengemukakan tanggapannya itu seseorang telah mengambil bagian

secara aktif dalam jaringan komunikasi massa. Dengan demikian, peranan pers dan media komunikasi lainnya merupakan faktor utama dalam modernisasi.

Teori Lerner ini tampaknya mempengaruhi banyak orang untuk mengikutinya. Dr. Astrid Susanto juga memakai teori ini untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan pembangunan masyarakat desa, dengan mengaitkan kemampuan membaca (huruf latin) dan volume informasi dengan arus urbanisasi. Bila kemampuan membaca masih dibawah 10 persen maka urbanisasi hampir tidak ada. Lain halnya dengan kemampuan membaca 10-25 persen di mana segera angka arus urbanisasi mencapai angka 25 persen ke atas. Hasil penelitian LIPI – Dep. Penerangan tentang akibat komunikasi modern (televisi) terhadap desa telah menjelaskan bahwa bagi desa-desa di Indonesia angka kemampuan membaca telah mencapai sekurang-kurangnya 60 persen dan sebagai akibatnya diketemukan adanya migrasi sekitar 40-50 persen. Hal ini menjelaskan pula bahwa pendidikan (yang tidak lain tidak bukan adalah komunikasi pula) perlu menyesuaikan isi pesannya dengan situasi desa, sehingga daya tarik kota tidak akan terlalu besar. Dengan demikian proses urbanisasi dapat dihindari dengan segala akibatnya, seperti gelandangan dan lain-lain di daerah perkotaan (1985:4).

Prof. Dr. Andre Hardjana (1996: 41) mencatat, berawal dari teori komunikasi tentang modernisasi Lerner itu kemudian berkembang dan dibedakan menjadi empat model yang berbeda, yakni model inovasi dengan keteladanan, model pengembangan swadaya atau pemecahan masalah sosial (self-help atau problem solving), model transformasi struktur sosial atau indoktrinasi dengan pengendalian kelompok dan model pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Mengenai media pers. Dr. Astrid S. Susanto banyak memberikan pemikiran bagi kemajuan dan perkembangan pers nasional. Percikan pemikirannya ditulis tahun 1989 yang menganalisis suatu system pers (termasuk radio dan televisi) yang cocok untuk Indonesia. Angin segar tahun 1966 telah melahirkan Undang-Undang Pokok Pers dalam usaha mengembalikan haluan pikiran pengembangan pers ke arah yang lebih bebas. Lahirlah ide mengenai Dewan Pers di Indonesia dengan ketentuan menteri penerangan sebagai ketua dewan pers secara *ex officio*. Namun oleh berbagai pihak dinilai Dewan Pers tidak dapat berbuat banyak untuk perbaikan kehidupan pers.

Dewan Pers pernah menjadi tumpuan harapan pers perbaikan pers dengan mencari suatu bentuk pers yang cocok untuk Indonesia. Wonohito, tokoh pers dari surat kabar Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, pernah mencanangkan Teori Pers Pancasila (1987) sebagai langkah nyata pertama dan panduan untuk pekerjaan redaksi maupun wartawan sehari-hari. Namun tampaknya maksud bijaksana dari tokoh pers Indonesia ini kurang dianggap

serius oleh masyarakat, bahkan oleh sebagian pelaku dalam dunia pers sendiri kurang memperoleh tanggapan positif. Banyak kejadian dalam dunia pers maupun dalam komunikasinya dengan pihak pemerintah yang menjadi masalah. Mungkin sebagian pelaku pers mempunyai konsep dan nilai-nilai yang agak berbeda dari berbagai pelaku dalam pemerintahan maupun masyarakat sendiri.

Perkembangan sejarah pers Indonesia ternyata banyak tertarik pada konsep-konsep liberal, yang sering bertentangan dengan sikap umum yang masih paternalistis-feodalistis tetapi ada juga yang liberal yang banyak berhadapan dengan pendekatan segi dominasi keamanan yang tidak terhindari. Dalam kaitan ini tulisan Denis Goulet (1973) tentang *The Cruel Choice* membahas bukan saja peran dari elit intelektual dan intelektualitas individual yang berhadapan dengan massa secara langsung. Tetapi melihat bahwa setiap masyarakat berdasarkan perkembangan budaya dan social politiknya selalu memiliki elit lokal yang terlupakan dan kurang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal. Elit lokal inilah yang dilihat Dr. Astrid Susanto sebagai jembatan antara massa dan kaum intelek, yang dalam beberapa hal terwakili oleh sebagian masyarakat pers dan wartawan. Elit lokal dapat mengadakan sejenis pengawasan sosial (*social control*) terhadap masyarakat luas maupun pemerintah karena mampu menyampaikan dan merumuskan harapan-harapan dan keperluan-keperluannya, untuk dipertimbangkan oleh pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa pemikiran Dr. Astrid ini, dengan menggunakan elit lokal dan memperhatikan lokal genius (*Cultural identity-kepribadian cultural*), akan dapat diperoleh suatu pengawasan sosial yang relevan, berhasil guna maupun bermutu untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam proses pembangunan, sehingga peran pers dalam masyarakat akan lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi khalayak dan pengambil keputusan.

IV. PENDAPAT UMUM

Dr. Astrid S. Susanto juga menjangkau pemikirannya dalam cabang pendapat umum, yang masih satu rumpun dalam ilmu komunikasi. Rektor Universitas Pajajaran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam kata sambutannya pada buku *Pendapat Umum* (1975) karangan Astrid Susanto menilai bahwa, *Pendapat Umum* merupakan salah satu kekuatan sosial yang secara langsung dapat menentukan kehidupan sehari-hari suatu bangsa. Selain itu *Pendapat Umum* banyak dipergunakan oleh media massa maupun kaum politisi dan pemerintah-pemerintah guna memperoleh dukungan masyarakat untuk program kerjanya. Walaupun untuk suatu keputusan politik dukungan

dari pendapat umum adalah penting, akan tetapi bidang politik bukanlah satu-satunya bidang, bahkan bukan bidang utama di mana pengaruh Pendapat Umum dapat dirasakan.

Prof. Mochtar Kusumaatmadja menilai pengadaan dan penggunaan dari suatu Pendapat Umum mempunyai banyak segi. Salah satu segi penting adalah peranan Pendapat Umum dalam proses pembentukan suatu undang-undang dan bahkan pula dalam memupuk tertib dan kesadaran hukum. Suatu rancangan undang-undang dapat saja diundangkan, akan tetapi apabila ia tidak dihayati oleh warga negaranya, maka tertib hukum akan kurang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat yang bersangkutan. Jika hal ini terjadi, maka antara pembentukan hukum, pelaksanaan dan kesadaran hukum masih akan terdapat perbedaan, bahkan mungkin suatu perpisahan pendapat. Kecuali itu perbedaan antara kesadaran, pembentukan dan pelaksanaan hukum dapat disebabkan pula oleh kurang informasi yang dimiliki Pendapat Umum tentang fungsi hukum dalam rangka mempertahankan eksistensi suatu bangsa melalui pentaatan terhadap hukum.

Dari pemikiran Prof. Mochtar Kusumaatmadja bila direfleksikan pada masa sekarang isu pro dan kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi semakin menjadi jelas bahwa masyarakat kurang memiliki informasi tentang masalah tersebut. Media massa kurang berperan secara seimbang dalam pembentukan pendapat umum yang positif. Dari pengamatan media massa cenderung memberitakan suara kontra terhadap RUU APP tersebut, sedangkan suara yang mendukung dimuat dalam porsi berita yang kecil atau sedikit.

Selanjutnya Prof. Kusumaatmadja menggaris bawahi bahwa penggunaan hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat mempunyai hubungan yang erat sekali dan terikat pula pada hukum positif suatu negara. Makin terbuka tempat atau forum pengeluaran pendapat ini makin banyak kemungkinan melanggar hukum yang berlaku. Karena itu pengetahuan tentang faktor-faktor Hukum, Psikologi, Politik dan Sosial yang ikut menentukan jalannya proses pembentukan Pendapat Umum, perlu diketahui oleh pihak-pihak yang berkecimpung secara sadar, langsung maupun tidak langsung dalam bidang ini; satu dan lain untuk menghindari pelanggaran hukum olehnya. Sebagaimana diketahui, maka tidak ada 2 negara yang menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat yang sama : kebebasan yang dinikmati tergantung daripada situasi sosial, politik dan hukum negara yang bersangkutan.

Pada bagian akhir kata sambutannya Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH menyatakan, buku yang ditulis Astrid Susanto dapat memberikan beberapa penjelasan mengenai pendapat umum, baik pembentukan, pembinaan maupun penggunaannya. Serta dengan membaca buku itu, penting pula guna menghindari salah tafsir dari kebebasan

mengeluarkan pendapat, terutama melalui media massa dan ucapan-ucapan yang dimaksudkan untuk diketahui oleh umum. Kelemahan ataupun kekuatan maupun batas-batas kemampuan dari pendapat umum sebagai suatu alat dalam usaha mencapai tujuan masyarakat melalui konsensus, perlu pula diketahui.

Sementara itu pokok pikiran Dr.Astrid S.Susanto tentang pendapat umum, digarisbawahi bahwa pendapat umum merupakan unsur yang ikut menentukan masa depan suatu bangsa. Akibat dari keputusan yang pernah diambil berdasarkan pendapat umum ataupun tidak, akan menentukan sekali kehidupan suatu bangsa dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Walaupun demikian, dewasa ini dimana-mana mulai dirasakan seakan-akan pengaruh pendapat umum makin kecil dalam proses pengambilan keputusan untuk tingkat daerah maupun nasional bahkan tingkat internasional. Timbullah pertanyaan : apakah yang menyebabkannya ? Apakah justru abad ke 20 ini dan abad selanjutnya , manusia mengalami kemunduran dalam demokrasi (sebagai akibat pemanfaatan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di sebanyak mungkin bidang),ataukah kita dalam masa lampau telah memberikan nilai yang berlebih-lebihan kepada pendapat umum sebagai suatu kekuatan social maupun kekuatan politik ? Apakah "Ratu Dunia" ini telah kehilangan mahkotanya ? Untuk mengatasi masalah-masalah dalam pendapat umum, Dr.Astrid melalui idealisme intelektualnya menulis buku *Pendapat Umum*. Dan harapannya, agar dapat memberikan sumbangannya dalam mendekatkan pihak-pihak yang berkecimpung secara aktif dan sadar dalam pengarahannya dan penggunaan pendapat umum dalam proses pengambilan keputusan , agar komunikasi yang terjadi dalam proses pembentukan pendapat umum dapat terjadi dengan harmonis.

Dapat digarisbawahi bahwa kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru dipraktikkan dengan terbatas, mengingat system pers yang dikembangkan adalah otoriter dalam konsep pers pembangunan. Sedangkan pendapat umum sebagai produksi media mempunyai peranan penting untuk menyalurkan agenda media kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjana, Andre A, "*Wanita Kota dan Media Massa*" Temuan Empiris Tentang pola dan Tujuan Penggunaan Media, *Jurnal Penelitian dan Komunikasi Pembangunan*, Nomor 39,1996/1997, 39-52.
- Lerner, Daniel, *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, terjemahan Muljarto Tjokrowinoto, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978.
- Rachmadi, F. *Perbandingan Sistem Pers*, Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara, Jakarta, PT Gramedia.1990.
- Rogers, Everett.M, "*Komunikasi Dalam Pembangunan*". Bahan Bacaan Peserta Stupindo, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia.1976.
- Susanto, Astrid.S. *Pendapat Umum*. Bandung: Bina Cipta.1975.
- Susanto, Astrid.S. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1985..
- Schramm,Wilbur, "*Peranan dan Bantuan Media Massa dalam Pembangunan Nasional*", dalam *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan* oleh Eduard Depari dan Colin MacAndrews (eds). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1991.
- William A.Hachten, "*Bentrokan Ideologi Lima Konsep Pers*", dalam *Komunikasi Internasional* oleh Dedi Djamaluddin Malik dkk (eds). Bandung: LP3K dan Remaja Rosdakarya,1993.
- Wonohito, *Sistem Pers Pancasila*. Jakarta: Departemen Penerangan RI,1977.
- Majalah Tempo Berita Mingguan, Edisi 30 April 2006.